



Peranan Pemerintah Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso

The Role of the Village Government in Panjo Village Community Empowerment Program South Pamona Subdistrict, Poso Regency

Herlan Lagantondo ^{a,1}, Maharaja Botilangi ^{b,2}, Kristanto Lagonda ^{c,3}

^{a, b, c} Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ herlanlagantondo5@gmail.com*

*korespondensi penulis

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 25-01-2021
Disetujui: 21-03-2021

Kata Kunci:

Peranan, Pemerintah Desa, Program Pemberdayaan, Masyarakat

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Desa dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso, serta faktor – faktor apa yang mempengaruhinya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei sebagai dasar dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi dengan melibatkan informan yang berkompoten dan bisa dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan serta penelusuran data atau dokumen – dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti atau di dapatkan dari lapangan, baik data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen dari berbagai sumber resmi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Desa dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso selama ini masih belum maksimal. Karena, Pemerintah Desa masih banyak fokus pada kegiatan – kegiatan yang sifatnya pembangunan infrastruktur atau fisik di desa, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya pengetahuan tentang konsep pemberdayaan yang sebenarnya dan alokasi anggaran sebagian besar pada program infrastruktur atau fisik semata.

Abstract: This study aims to find out the role of the Village Government in the community empowerment program in Panjo Village, South Pamona Subdistrict, Poso Regency, and factors influence it. The research method used is survey research as the basis for the type of descriptive research. Data collection techniques are carried out using observation techniques, in-depth interviews and documentation by involving competent informants were then analyzed qualitatively by explaining or describing the data studied or obtained from the field, both primary data obtained from interviews, and secondary data obtained through library searches and documents from various official sources. The results of the research obtains that the role of the Village Government in the community empowerment program of Panjo Village, South Pamona Subdistrict, Poso Regency has not been maximized. It because the Village Government still focuses a lot on infrastructure or physical development in the village. The influencing factors are the lack of knowledge about the actual concept of empowerment and the budget allocation is mostly on infrastructure or physical programs.



PENDAHULUAN

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Masalah kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan atau dilaksanakan kepada masyarakat tentunya ada proses evaluasi, seperti yang dikatakan Wahab (1997:46) bahwa banyak negara-negara yang sudah maju mulai menyadari akan setiap proses pelaksanaan pembangunan, baik dalam proses perumusan, pelaksanaan maupun dalam proses evaluasi kebijakan. Pemerintah juga dituntut untuk memperhatikan masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat, baik itu masalah pelestarian lingkungan maupun masalah hak-hak asasi manusia. Konotasi atau masalah pembangunan (*development*) tidak lagi semata-mata dilihat sebagai persoalan perbaikan (*improvement*) khususnya persoalan struktur ekonomi masyarakat, semisal penciptaan kemakmuran apabila kebijakan-kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan proses evaluasi.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1989:667) kata peranan mengandung arti, bagian tugas utama yang harus dilakukan. Kemudian menurut Purwadarminta (1989:735) arti kata peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama (dalam hal terjadinya suatu hal dan peristiwa). Pengertian ini menunjuk kepada suatu kelompok sosial tertentu, baik secara sepiantas maupun berlangsung lama atau tetap didalamnya terdapat seseorang atau beberapa orang yang bertindak atau berperan sebagai kepala atau pemimpin kelompoknya.

Oleh Suharto (1997:218), mengatakan bahwa dalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan akan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha

Seterusnya Suharto, (1997:210) mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan, yaitu

- a. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- b. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Dengan demikian, maka untuk menopang peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan kemampuan SDM yang memadai, dan tentunya ini juga harus disertai dengan pengimplementasian kebijakan yang dapat membangkitkan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan.

Hasil prasurvei menunjukkan bahwa walaupun Desa Panjo yang masyarakatnya sudah cukup besar, namun aparatur desanya sebagian besar masih berpendidikan SLTA, hal ini sangat mempengaruhi penyelenggaraan tugas Kepala Desa di desa, dalam hal percepatan peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan, ternyata masih sangat lambat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dorongan/motivasi Kepala Desa dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pembangunan di desa. Lambatnya peningkatan pemberdayaan masyarakat juga dipengaruhi oleh aparatur pemerintah desa yang kurang profesional dalam pelayanan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Pengamatan awal juga menunjukkan bahwa di Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan masih terdapat aparatur yang kurang memiliki etos kerja yang baik. Hal ini terlihat bahwa aparatur diliputi kelesuan bekerja dalam berbagai bentuk ; seperti kurang inisiatif dalam pelayanan masyarakat, sering menggunakan jam kerja untuk bercakap-cakap, terlambat masuk kantor dan bahkan tidak masuk kantor dengan berbagai alasan yang kurang jelas. Keadaan yang demikian pada gilirannya akan menyebabkan terlambatnya realisasi program kerja Kepala Desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Kualitatif. Dasar penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan serta mendapatkan informasi-informasi dan data-data yang ada dilokasi penelitian. Jenis data

terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari informan penelitian dan dokumen – dokumen dari desa setempat. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD, Anggota BPD 1 Orang dan Tokoh Masyarakat 6 Orang sehingga informan berjumlah 10 Orang. Sedangkan informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Panjo sebagai kepala pemerintahan di desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan analisis model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011:334) dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

- a. Reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pokoknya.
- b. Penyajian data. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan organisasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lainnya.

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Verifikasi data dimulai sejak permulaan pengumpulan data sampai ditemukan bukti baru maka kesimpulan awal tersebut tidak berubah. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan sudah kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pemerintah Desa dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso

Untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso, berikut ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian sesuai dengan teori yang digunakan peneliti dalam menyusun pedoman wawancara. Teori yang dimaksud adalah teori yang dikemukakan oleh Suharto (1997:218), yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan akan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

1. Pemungkinan

Berarti Kepala Desa harus mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat desa panjo berkembang secara optimal. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian bapak H. Herois Sau jabatan Kepala Desa Panjo pendidikan terakhir SMA pada tanggal 13 Mei 2019, memberi keterangan bahwa :

“dalam upaya menciptakan suasana yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan potensi mereka, Kepala Desa selalu memberikan dorongan dan kesempatan dan didukung dengan biaya”

Selanjutnya dilakukan lagi wawancara dengan informan penelitian Aprianus Mengkuji jabatan Kepala Seksi Pemerintahan pendidikan terakhir SMA, memberi keterangan bahwa :

“dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa panjo kecamatan pamona, selama ini masih lebih banyak konsen pada program – program infrastruktur, untuk program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat masih kurang dilaksanakan”

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Kepala Desa dalam upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan pengembangan potensi masyarakat desa dalam meningkatkan pemberdayaan belum maksimal. Karena, hanya berfokus pada kegiatan – kegiatan fisik semata.

2. Penguatan

Berarti Kepala Desa harus dapat memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat desa panjo dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan kesehariannya. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian Yoris Silaka jabatan Ketua BPD pendidikan terakhir SMA pada tanggal 16 Mei 2019, memberi keterangan bahwa

“dari apa yang lihat selama ini Kepala Desa masih kurang memberikan pelatihan – pelatihan tentang masalah – masalah yang berhubungan dengan kebutuhan ril masyarakat seperti pengembangan usaha kreatif dan bagaimana berwirausaha yang baik”

Selanjutnya dikatakan lagi oleh informan penelitian Rohan Tauna jabatan Anggota BPD pendidikan terakhir SMA, memberi keterangan bahwa :

“Kepala Desa dalam upaya memperkuat pengetahuan yang dimiliki masyarakat masih dapat dikatakan kurang, karena jarang sekali dilakukan seminar – seminar tentang pemberdayaan masyarakat”

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Kepala Desa dalam memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat desa panjo dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan kesehariannya khususnya yang berhubungan dengan pemberdayaan masing kurang. Dimana, kurangnya dilakukan pelatihan atau seminar dalam upaya menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang konsep pemberdayaan.

3. Perlindungan

Berarti melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian Akis T jabatan Tokoh Agama (Penatua) pendidikan terakhir SMA pada tanggal 17 mei 2019, memberi keterangan bahwa :

“menurut saya selama ini Kepala Desa melindungi semua lapisan masyarakat, tidak ada tindakan diskriminasi”

Selanjutnya dikatakan lagi oleh informan penelitian Kungge jabatan Tokoh Pemuda pendidikan terakhir SMA, memberi keterangan bahwa :

“Kepala Desa sudah berusaha melindungi semua lapisan masyarakat, sehingga tidak terjadi gejala yang mengancam keutuhan masyarakat”

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Kepala Desa sudah dapat melindungi semua lapisan masyarakat dan tidak terjadi diskriminasi dalam masyarakat.

4. Penyokongan

Berarti pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Setelah dilakukan wawancara dengan informan penelitian Tin Dongalemba jabatan Tokoh Pemuda pendidikan terakhir SMA pada tanggal 21 Mei 2019, memberi keterangan bahwa :

“selama ini saya melihat bahwa Kepala Desa sudah memberikan motivasi, tetapi sifatnya masih pada hal – hal yang tidak berhubungan dengan pemberdayaan”

Kemudian dikatakan lagi oleh informan penelitian yang lain Uma Ori jabatan Tokoh Adat pendidikan terakhir SMA, memberi keterangan bahwa :

“dalam upaya memberikan bimbingan tentang pelaksanaan tugas majelis adat, Kepala Desa masih kurang”

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Kepala Desa dalam upaya membangkitkan semangat semua lapisan masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki masih belum maksimal.

5. Pemeliharaan

Berarti pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian Yermin jabatan Tokoh Wanita pendidikan terakhir SMA pada tanggal 24 Mei 2019, memberi keterangan bahwa :

“selama Kepala Desa selalu menjaga keutuhan anggota PKK di desa”

Selanjutnya dikatakan oleh informan penelitian Pius Makudja, S.Pd jabatan Tokoh Pendidikan pendidikan terakhir S1, memberi keterangan bahwa :

“selama ini Kepala Desa berlaku adil pada semua kelompok masyarakat”

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Kepala Desa memberikan kesempatan yang sama kepada semua lapisan masyarakat untuk berusaha.

Dari pemaparan hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa peranan Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa panjo kecamatan pamona selatan kabupaten poso selama ini masih belum maksimal. Karena, Kepala Desa masih banyak fokus pada kegiatan – kegiatan yang sifatnya pembangunan infrastruktur atau fisik di desa.

Faktor yang mempengaruhi peranan Pemerintah Desa dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso

Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso, berikut ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan penelitian. Yaitu :

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Informan Yoris Silaka jabatan Ketua BPD pendidikan terakhir SMA yang diwawancarai tanggal 15 Mei 2019, memberi keterangan bahwa :

“Sesuai apa yang saya lihat selama ini, Kepala Desa dalam melakukan atau memprogramkan kegiatan – kegiatan di desa lebih konsen pada kegiatan ceremonial dan fisik karena lebih mendatangkan keuntungan dari pada kegiatan – kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat”

2. Faktor alokasi anggaran sebagian besar pada program infrastruktur atau fisik

Informan Akis T jabatan Tokoh Agama (Penatua) pendidikan terakhir SMA yang diwawancarai tanggal 17 Mei 2019, memberi keterangan bahwa :

“menurut pendapat saya, peranan Kepala Desa dalam upaya meningkatkan potensi pemberdayaan masyarakat di kecamatan pamona selatan selama ini belum maksimal. Selama ini akibat alokasi biaya yang lebih banyak pada program fisik, seringkali berdampak pada kurangnya kegiatan – kegiatan pelatihan kepada masyarakat”

Selanjutnya diperkuat dengan Informan Kungge jabatan Tokoh Pemuda pendidikan terakhir SMA, memberi keterangan bahwa :

“menurut saya akibat sebagian besar anggaran/biaya digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik, maka kegiatan yang sifatnya memperkuat pengetahuan masyarakat dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kurang dilaksanakan”.

PENUTUP

KESIMPULAN

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala Desa dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso selama ini masih belum maksimal. Karena, Kepala Desa masih banyak fokus pada kegiatan – kegiatan yang sifatnya pembangunan infrastruktur atau fisik di desa. Faktor yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso adalah sumber daya manusia (SDM) dan alokasi anggaran sebagian besar pada program infrastruktur atau fisik semata. Dan beberapa hal yang disarankan yaitu :

1. Kepala Desa dalam menyusun rancangan anggaran di desa harus berimbang dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kepala Desa harus lebih banyak melakukan kegiatan – kegiatan pelatihan tentang hakekat konsep pemberdayaan masyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahab Abdul, 1997. *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Thoha Mifta, 1990, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta Rajawali Press.
- Verger K.J., 1981. *Sosiologi Pengetahuan*, FISIP Unsrat, Manado. Westerman & Donoghue, 1992. *Pengelolaan Sumberdaya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1989 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jack C Plano, 1994, *Kamus Analisa Politik*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Poerwadaminta W. J. S. 1986, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Nasional.
- Siagian, S. P. 1983, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Stoner James. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Editor Nashir Budiman, CV. Rajawali.
- Sudarsono Juwono, 1982. *Politik dan Pembangunan. Pilihan Masalah*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Subagyo Joko. 1991. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta, Rieka Cipta.
- Sudjana Nana. 1995. *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Para Peneliti*, Edisi Ke dua, Tarsito, Bandung.
- Suryaningrat Bayu, 1980. *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*, Bina Aksara.
- Taliziduhu Ndara, 1981, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Desa (SOTK)